

<b>Vol 9, No 1</b>	<b>2025</b>	<b>Halaman 035 - 055</b>
--------------------	-------------	--------------------------

**Problematika Literasi Digital Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 di Kota Sorong**

Efa Rubawati Syaifuddin, Andi Ahriani, Dwi Iin Kahinah,  
Masseni, Abdullah, A'mal Jadid  
Institut Agama Islam Negeri Sorong,  
Jalan Sorong- Aimas, Sorong Timur, Papua Barat Daya  
Email: [rubawatiefa@gmail.com](mailto:rubawatiefa@gmail.com)

*English Title: Digital Literacy Problems of First-Time Voters in the 2024 Regional Elections in Sorong City*

Received: 09-06-2025, Revised: 10-09-2025, Acceptance: 03-11-2025

**Abstract**

*This research examined the digital literacy challenges faced by first-time voters in the 2024 Regional Elections in Sorong City, Southwest Papua. The audience reception analysis method, based on Stuart Hall's Encoding and Decoding theory, was employed to examine the impact of social media on the political information preferences of first-time voters (Generation Z). Furthermore, the study also analyzed the digital literacy challenges faced by Generation Z in the 2024 Regional Elections in Sorong City. Data were collected using observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGDs). The study found that Generation Z, who are first-time voters, preferred social media as the source of political information in the 2024 Regional Elections in Sorong City. Instagram and TikTok were the most frequently accessed by Generation Z to obtain information about gubernatorial and mayoral candidates. However, the political participation of first-time voters was still influenced by other factors, such as parents. The digital literacy challenges experienced by first-time voters in Sorong City in the 2024 Regional Elections were promoted by a decline in reading interest, reading long texts, and the preference to use social media as the primary source of political information. Furthermore, the lack of outreach from election organizers, particularly on social media, which is widely accessed by Generation Z, has prevented these first-time voters from fully understanding their role in the 2024 regional elections. The massive exposure to information on social media and the controversies between the candidates have led to a decline in political participation among first-time voters in the 2024 regional elections in Sorong City.*

**Keywords:** *Sorong City, Digital Literacy, Social Media, First-Time Voters, 2024 Regional Elections.*

### **Abstrak**

Penelitian ini menelaah problematika literasi digital bagi pemilih pemula pada pilkada 2024 di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Metode analisis resepsi khalayak dengan teori Encoding and Decoding Stuart Hall digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dampak media sosial dalam preferensi informasi politik pemilih pemula (generasi Z). Selain itu juga menganalisis problematika literasi digital generasi Z pada Pilkada tahun 2024 di Kota sorong. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian ini menemukan bahwa generasi Z yang merupakan pemilih pemula menjadikan media sosial sebagai preferensi informasi politik pada pilkada tahun 2024 di Kota Sorong. Instagram dan Tiktok menjadi media yang paling banyak diakses oleh generasi Z untuk mendapatkan informasi tentang calon gubernur maupun calon walikota. Meskipun demikian, partisipasi politik pemilih pemula masih dipengaruhi oleh orang lain, seperti orang tua. Problematika literasi digital yang dialami oleh pemilih pemula di Kota Sorong pada Pilkada Tahun 2024 dikarenakan menurunnya minat membaca, tidak suka membaca teks yang panjang serta menjadikan media sosial sebagai rujukan utama informasi politik. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, terutama di media sosial yang banyak diakses oleh generasi Z, menjadikan pemilih pemula ini tidak memahami dengan baik perannya dalam pilkada tahun 2024. Paparan informasi yang masif dari media sosial dan kontroversi antara para calon kandidat, membuat partisipasi politik pemilih pemula menurun pada Pilkada 2024 di Kota Sorong.

**Kata Kunci:** Kota Sorong, Literasi Digital, Media Sosial, Pemilih Pemula, Pilkada 2024.

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 masyarakat Indonesia telah menentukan wakilnya baik pada Lembaga Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kota) dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)(Komisi Pemilihan Umum, 2022). Pada tahun yang sama, tanggal 27 November 2024, sebagian besar masyarakat Indonesia kembali memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah baik pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Wibawana, 2024), salah satunya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Beberapa tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna menyongsong pesta demokrasi, salah satunya pemutakhiran data pemilih, pembuatan regulasi, pembahasan anggaran, dan lainnya. Terkait pemutakhiran data pemilih, KPU telah menetapkan sebanyak 204.8 juta pemilih tetap pada pemilu 2024, yang terbagi dalam beberapa kategori, kategori pertama usia 17 hingga 30 tahun sebanyak 63.953.031 orang atau 31,23 persen dari total DPT Indonesia, kategori kedua pemilih usia 31 hingga 40 tahun berjumlah 42.398.719 orang atau 20,70 persen dari total DPT. Lalu pemilih berusia di bawah 17 tahun karena sudah menikah 0,003

persen atau 6.697 pemilih. Sementara pemilih dengan usia 40 tahun ke atas berjumlah 98.448.775 orang atau 48,07 persen (KPU, 2024).

Dari data yang dirilis oleh KPU Republik Indonesia, terdapat 46.800.161 orang dengan kategori Gen Z atau pemilih dengan kelahiran antara 1997-2012 sebanyak 52 persen (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang akan menyuarakan hak pilihnya pada tahun 2024 akan diisi oleh banyak pemilih pemula. Begitupun Kota Sorong, menurut data yang dirilis oleh KPU Kota Sorong, dari 205.412 Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat 53.813 orang atau 26,19% pemilih yang dikategorikan generasi Z, dan 81.427 orang atau 39,64% pemilih dengan kategori pemilih milenial. Itu menandakan, bahwa 65,83% suara ditentukan oleh pemilih pemula dan pemilih generasi muda (KPU Kota Sorong, 2024). Kategori pemilih pemula adalah usia 17 hingga 21 tahun, atau disebut sebagai generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.

Generasi Z dikenal akrab dengan teknologi canggih dan mutakhir. Mereka mampu melakukan kegiatan secara bersamaan yang berhubungan dengan dunia maya. Misalnya mereka dapat berselancar di situs-situs, sambil melakukan aktivitas di media sosial, dan mendengarkan musik (Sanjaya, 2024). Dengan kata lain, generasi Z yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024 merupakan orang-orang yang dekat dengan teknologi internet dan dapat mengakses situs-situs yang berisi muatan kampanye. Penyebaran informasi melalui internet pada masa kampanye sangatlah massive. Dalam masa kampanye, tentunya para kontestan dan timnya harus mampu menyediakan konten-konten menarik yang sesuai dengan kondisi jika tujuannya adalah pemilih pemula. Media memegang peran penting dalam memotret isu-isu pemberitaan terkait Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Melalui framing berita, media bisa mengarahkan sudut pandang pemilih pemula dan masyarakat sesuai sudut pandang si pembuat berita.

Pentingnya pemahaman literasi media digital bagi pemilih pemula yang memberikan hak suara politiknya pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024, harus menjadi perhatian dari banyak pihak. Pengetahuan literasi media menurut pandangan Baran (Baran, 2004) merupakan bagaimana individu mampu mengonsumsi konten media dengan baik dan benar. Baran juga memberikan penekanan bahwa mengonsumsi media yang dimaksud bukan hanya soal bisa menghidupkan televisi atau mengklik situs berita, namun bagaimana ia bisa menyaring informasi media yang ada sebagai informasi yang bisa dipergunakan sebagai pengetahuan.

Uzunboylu dalam (Wahid, 2017) juga menegaskan bahwa literasi digital merupakan sebuah pengetahuan dan kemampuan yang mutlak harus dimiliki setiap orang dengan tujuan pengembangan dirinya dan mampu memberikan partisipasi aktif dalam masyarakat yang berbasis teknologi. Kemampuan ini terkait dengan bagaimana seseorang mampu mengoperasikan teknologi tertentu, mengetahui apa dampak dan baik dan buruknya teknologi itu sendiri.

Dalam penelitian (Adiarsi, 2019), terkait kemampuan literasi media internet di kalangan mahasiswa di DKI Jakarta, ia menemukan hal menarik, Dimana mahasiswa yang memiliki kesibukan dengan dunia pekerjaannya yang lain, mereka mengakses internet hanya dibawah 5 jam dalam satu hari, berbeda dengan mahasiswa yang tidak

memiliki pekerjaan, mereka mengakses internet di atas 5 jam per hari, hampir setiap saat mereka menggunakan Internet untuk media sosial dan aplikasi pesan lainnya melalui gadget mereka. Temuan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa generasi z bersikap kritis hanya pada informasi atau pemberitaan yang bersifat viral atau diperdebatkan. Informasi seperti pemberitaan hasil debat kandidat calon kepala daerah dan penyampaian argumentasi terkait dengan visi misi merupakan hal menarik dan menjadi perhatian generasi z, terutama pada masa kampanye (Komisi Pemilihan Umum, 2022).

Menilik dari hasil penelitian sejenis, penelitian ini mengkaji sejauh mana urgensi literasi media bagi masyarakat terutama pemilih pemula pada masa kampanye Pemilukada 2024 di Kota Sorong. Literasi media yang dibutuhkan pemilih pemula tidak hanya terbatas pada konten media dalam konteks konvensional seperti pemberitaan pada umumnya, tapi lebih kepada literasi media dalam ranah perkembangan teknologi internet. Dewasa ini berita pada media online menjadi medium yang paling banyak dicari oleh generasi muda, termasuk halnya pemberitaan mengenai kampanye Pemilu 2024 yang dapat menjadi landasan sebelum mengambil keputusan untuk memberikan hak suaranya kepada para kandidat.

Penelitian ini menekankan pada pentingnya literasi digital bagi pemilih pemula dalam menentukan hak suaranya dalam Pemilukada 2024 di Kota Sorong, selain itu, akan memberikan kajian terkait penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Bab IV Pasal 198 memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 14 Februari 2024 dan atau 27 November 2024 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu maupun Pemilihan Anggota legislative serta Gubernur dan Walikota/ Bupati.

Terdapat beberapa persoalan yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam menghadapi pemilukada 2024, pertama masalah administrative, pemilih pemula yang mudah dipolitisasi mengingat mereka adalah pemilih mayoritas yang bisa dijadikan komoditas dalam masa kampanye meskipun pada akhirnya kebijakannya tidak mencerminkan kebutuhan akan generasi z itu sendiri. Kedua, pemilih pemula rawan didekati, dipersuasi, dipengaruhi, dimobilisasi, dan sebagainya untuk bersedia mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh para kandidat (Wahyuti, 2019).

Melalui penguasaan teknologi canggih yang dimiliki generasi Z sudah barang tentu informasi yang mereka akses dan mereka terima bukan sebuah hal yang tabu bagi mereka. Penguasaan teknologi telah menghubungkan mereka pada pertemuan semu dalam dunia maya, ataupun dunia game yang telah banyak dijadikan media komunikasi bagi generasi Z sebagai medium untuk berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Melalui perangkat berbasis teknologi canggih ini pula, informasi kampanye politik yang mereka terima dapat dijadikan rujukan mereka dalam menentukan hak politiknya pada Pemilu mendatang.

Media sebagai sumber informasi misi politik memiliki peranan yang fundamental dalam memberikan arah dan pandangan politik bagi calon pemilih, begitupun bagi pemilih pemula. Hamad memberikan penjelasan dalam membuat kerangka opini

public media massa pada dasarnya melaksanakan tiga hal. Pertama, menggunakan language of politics. Kedua, framing strategies dan ketiga agenda setting function.

Dalam melaksanakan ketiga Tindakan tersebut, barang tentu sebuah media dipengaruhi oleh kondisi internal media itu sendiri, baik kebijakan redaksi terkait dengan kedekatan dan kekuatan politik penguasa, faktor eksternal seperti pressure dari para konsumen media itu sendiri, sistem politik yang sedang terjadi atau kekuatan diluar redaksi itu sendiri. Dengan begitu suatu peristiwa politik dapat menghasilkan opini politik yang berbeda tergantung bagaimana media memotret kejadian tersebut.

Era saat ini, media massa dan media sosial telah menjadi alat bagi pihak tertentu untuk mencapai tujuan politiknya, dikarenakan keunggulan yang dimiliki serta cost poliitk yang dikeluarkan untuk menghasilkan citra baik tidak terlalu besar. Kemudahan akses dan tanpa Batasan wilayah mnejadikan hal itu semakin diminati para politikus dalam meraup elektabilitas. Wahyuni (Wahyuni, 2013) dalam tulisannya menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi instrument dalam berpolitik. Peran serta masyarakat menjadi terbuka lebar dalam mengeluarkan aspirasi yang menyebabkan aliran komunikasinya pun tidak lagi linier, tetapi berada sepenuhnya di tangan pengguna.

Penelitian ini akan terfokus melihat pentingnya literasi digital bagi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Sorong dan Papua Barat Daya pada 27 November 2024. Apakah para pemilih pemula, yang menjadi target besar untuk mendulang suara di tahun 2024 terutama di Kota Sorong telah memiliki literasi digital yang baik dalam menghadapi Pilkada 2024. Bagaimana urgensi dari literasi digital saat ini terhadap kemampuan mendapatkan informasi serta upaya untuk meminimalisir hoax dan ujaran kebencian bagi para pemilih pemula. Selain itu juga ingin melihat hal-hal apa saja yang telah dilakukan sebagai upaya preventif terhadap penyebaran hoax dan ujaran kebencian menjelang Pilkada 2024.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi khalayak Stuart Hall. Teori Encoding and Decoding Stuart Hall dalam (Ida, 2022) mendorong terjadinya interpretasi-interpretasi beragam dari teks media selama proses produksi dan penerimaan (resepsi). Dapat dipahami, Hall menyatakan bahwa makna tidak pernah pasti. Jika bisa pasti oleh representasi, maka tidak akan ada pertukaran, sehingga tidak ada strategi yang mengkonter atau interpretasi-interpretasi yang berbeda. Ada tiga interpretasi yang berbeda dikenalkan oleh Hall, yakni: *pertama*, yang disebut dengan posisi dominan-hegemoni ('dominant-hegemonic position'), penerima pesan secara penuh menerima begitu saja ideologi dominan dari konten media tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan. *Kedua*, yang disebut dengan negosiasi ('negotiated code') yang bertindak antara adaptif dan oposisi terhadap interpretasi pesan. *Ketiga*, disebut dengan oposisi ('oppositional code'), adalah ketika penonton melawan atau berlawanan dengan representasi yang ditawarkan dalam konten atau isi pesan media. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang merupakan generasi z dengan rentan usia 13 - 29 tahun atau yang lahir pada tahun 1997 - 2012. Responden terdiri dari siswa/i SMA atau sederajat, mahasiswa serta para

pekerja. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui telaah data, reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran data.

## **DISKUSI**

### **Penyebaran Informasi Politik pada Generasi Z Melalui Media Sosial**

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman politik bagi anak muda adalah melalui media sosial (Haloho, E. E., Rembang, M., & Waleleng, 2016). Media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau anak muda dan menyampaikan informasi politik dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Anak muda saat ini sangat aktif di media sosial dan menjadikan *platform* ini sebagai sumber informasi utama. Dari 30 generasi z di Kota Sorong, 70% diantaranya menyatakan menggunakan media Instagram dan tiktok sebagai preferensi politik pada pilkada Kota Sorong tahun 2024, sementara 30% diantaranya menyatakan selain instagram dan tiktok, whatsapp dan facebook juga menjadi media utama dalam mendapatkan informasi politik. Berbanding lurus dengan data yang menunjukkan bahwa instagram, telah menjadi salah satu platform utama untuk penyebaran informasi politik, melalui konten-konten real yang berada di aplikasi instagram.

Selain Instagram, media sosial tiktok juga menjadi perhatian bagi generasi z di Kota Sorong ketika mencari informasi politik, hal ini dikarenakan tiktok telah menjadi aplikasi yang sangat populer di Indonesia, terutama pada saat adanya pandemi covid-19 yang mengubah pola hidup masyarakat. Kepopulerannya menjadikan tiktok sebagai platform yang sangat menarik untuk dikembangkan dengan menawarkan pendekatan yang lebih natural dan spontan. Konten videonya yang singkat dan fokus pada hiburan membuat tiktok menjadi platform yang lebih mudah diakses dan digemari oleh pengguna. Selain itu, tiktok memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi public, menjadi salah satu aspek penting dari dampak penggunaan media sosial (Faradis et al., 2023).

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjelma menjadi kekuatan yang tak terelakkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia politik (Dominika & Susilo, 2024). Dengan memanfaatkan media sosial, informasi politik dapat disajikan dalam format yang lebih interaktif dan menarik, seperti video, infografis, dan konten multimedia lainnya. Hal ini dapat membantu anak muda untuk lebih mudah memahami konsep-konsep politik yang rumit dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu politik.



**Gambar 1**  
**Konten Video Pentingnya Gen Z memilih**  
Sumber : Instagram KPU Kota Sorong, 2024



**Gambar 2**  
**Info Grafis Daftar Pemilih Tetap di Kota Sorong**  
Sumber: Instagram KPU Kota Sorong, 2024

Konten video singkat atau infografis yang menarik di media sosial sebagai media penyebaran informasi politik dinilai efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada generasi z. Hal ini dikarenakan generasi z sangat terhubung dengan internet dan media sosial, keseharian mereka tidak terlepas dari konten media sosial. Generasi ini memiliki karakteristik unik dalam konsumsi informasi, termasuk informasi politik. Mereka cenderung lebih memilih media sosial sebagai sumber informasi utama dibandingkan dengan media tradisional seperti televisi atau surat kabar. Memanfaatkan jejaring media sosial yang tidak terbatas dan konsumsi pesan yang masif dari generasi z, banyak kelompok, organisasi, instansi atau bahkan politikus atau calon kandidat menggunakan media sosial sebagai media sosialisasi kepada generasi z.

Para calon membagikan aktivitas kampanye digital di akun media sosial dengan mengunggah banyak video kampanye dan sosialisasi dengan memberikan berbagai efek, background musik, dan solawat. Hal ini membuat akun media sosialnya memiliki pengikut yang bertambah setiap harinya. Selain itu, dengan memanfaatkan fitur stori dan tag yang memungkinkan orang yang melihat menjadi penasaran dengan konten di media sosial tersebut. Lebih lanjut, menggunakan deskripsi dan hastag yang memiliki tujuan agar orang lain mudah menemukan konten. Hastag membantu orang menemukan konten yang mereka minati, ketika seseorang mencari hastag tertentu, media sosial akan menampilkan semua postingan yang menggunakan hastag tersebut. Memanfaatkan hastag juga dapat membangun komunitas tertentu, dengan menggunakan hastag yang sama, pengguna dapat saling terhubung dan berkolaborasi.



**Gambar 3**  
**Siaran Langsung Kegiatan Kampanye**  
Sumber: Tiktok ARUS, 2024

Siaran langsung dalam sebuah kegiatan kampanye nyatanya dapat ditonton lebih dari 1.000 orang, jika dilakukan dalam sebuah kegiatan offline (bertemu fisik), sangat sulit untuk mengundang terutama generasi z untuk hadir secara langsung dalam kegiatan kampanye tersebut. Namun, berbanding terbalik jika dilakukan melalui media sosial, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Oleh karenanya selain melakukan kampanye secara langsung, banyak calon kandidat yang memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi politik dengan target komunikasi generasi z. Dari 30 generasi z yang merupakan responden, 13 orang diantaranya menyatakan bahwa mereka percaya dengan informasi politik yang ada di media sosial. Informasi politik yang ada di media sosial, baik itu disampaikan oleh pribadi, organisasi maupun para calon kandidat, merupakan informasi politik yang benar dan dapat dijadikan sebagai preferensi politik. Hal ini dikarenakan dalam konteks politik, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi dukungan politik.

Dalam teori Encoding and Decoding Stuart Hall dalam (Ida, 2022) 13 generasi z di Kota Sorong atau sebanyak 43% dari total responden ini disebut dengan posisi dominan-hegemoni (*'dominant-hegemonic position'*) dimana penerima pesan secara penuh menerima begitu saja ideologi dominan dari konten media tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan. Penerima pesan media juga menjelaskan kehidupan mereka sendiri, perilaku, dan pengalaman sosial dalam ideologi ini. Audiens seperti ini dikategorikan sebagai "operating inside the dominant code". Lebih lanjut, 43% generasi z dari total responden ini menyatakan bahwa sesungguhnya informasi politik di media sosial adalah informasi yang benar, hanya saja ada beberapa oknum yang mencoba menggiringnya menjadi opini yang tidak benar, oleh karenanya penting bagi generasi z untuk memahami pesan politik di media sosial secara menyeluruh, bukan potongan-potongan yang kemudian menjadi viral saja.

Sementara itu, 10 generasi z lainnya berpendapat bahwa dalam memanfaatkan media sosial sebagai media informasi politik pada pilkada Kota Sorong tahun 2024, generasi z perlu dibekali dengan literasi digital yang baik. Media sosial yang banyak diakses oleh generasi z saat ini juga marak peredaran berita hoax dan ujaran kebencian, terutama menjelang dan saat kampanye dilaksanakan. Literasi digital menjadi kunci bagi Generasi Z untuk memilah informasi yang benar dari yang salah, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam diskusi politik dan proses demokrasi. Selain itu, media sosial memungkinkan Generasi Z untuk terhubung dengan berbagai kelompok dan komunitas yang memiliki minat dan pandangan politik yang sama. Ini menciptakan ruang bagi mereka untuk berbagi ide, berdiskusi, dan bahkan mengorganisir aksi sosial atau kampanye politik. Keterlibatan ini dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dari 10 generasi z atau 33% dari total responden ini menyatakan bahwa media sosial sebagai penyebaran informasi politik bagi generasi z di Kota Sorong bagaikan dua mata pisau. Jika digunakan secara bijak, media sosial sangat bermanfaat bagi generasi z, selain untuk penyebaran informasi politik juga meningkatkan partisipasi

dan kesadaran politik generasi z. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, apalagi jika generasi z tidak dibekali dengan literasi digital yang baik, maka yang terjadi generasi z terkontaminasi oleh berita hoax dan ujaran kebencian. Menurut Stuart Hall dalam (Ida, 2022), 10 generasi z ini disebut dengan kelompok negosiasi ('negotiated code') yang menjelaskan audiens atau penerima pesan yang mencampurkan interpretasinya dengan pengalaman sosial tertentu. Audiens yang masuk dalam kategori negosiasi ini bertindak antara adaptif dan oposisi terhadap interpretasi pesan.

Lebih lanjut, 7 generasi z di Kota Sorong lainnya, atau sebanyak 23% dari total responden berpendapat bahwa penyebaran informasi politik di media sosial menjelang, saat hingga selesai proses pilkada di Kota Sorong berdampak negative bagi generasi z. Hal ini berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh mereka, bahwa dengan mendapatkan informasi hoax atau berita palsu di media sosial, yang disebar dengan masif membuat banyak generasi z saling berdebat hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Selain di dunia maya, dampak dari hoax dan ujaran kebencian juga menyebar ke dunia nyata. Ketika mereka mendapatkan informasi yang disebar melalui grup-grup *whatsapp* dan facebook yang meminta untuk melakukan unjuk rasa untuk membela salah satu pasangan calon tertentu, generasi z tanpa berfikir panjang ikut serta, hingga berujung perbuatan anarkis.

Sebanyak 23% generasi z dari total responden ini dalam pandangan Stuart Hall dalam (Ida, 2022) disebut sebagai oposisi ('*oppositional code*'), adalah ketika penonton melawan atau berlawanan dengan representasi yang ditawarkan dalam konten atau isi pesan media dengan cara yang berbeda dengan yang telah ditawarkan. Menurut mereka, konten yang ditampilkan di media sosial banyak bermuatan persuasif yang negatif, mengundang perdebatan yang berujung pada cacik maki, saling menyalahkan dan menyudutkan antar para pendukung calon. Seharusnya, para calon kandidat dan para pendukungnya tidak membenarkan salah satu calon saja dan menghujat para calon kandidat lainnya, apalagi jika sudah membawa marwah OAP (Orang Asli Papua).

## **Partisipasi Generasi Z pada Pemilu**

Generasi z adalah generasi pertama yang tumbuh dengan akses luas ke internet dan teknologi digital sejak usia muda. Mereka sangat mahir dalam menggunakan berbagai perangkat teknologi dan media sosial, membuat mereka dikenal sebagai digital natives. Partisipasi generasi z menjadi sorotan dalam publik karena mereka membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik yang ada. Jika generasi z diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, mereka akan mengeluarkan potensi mereka agar hal yang diinginkan terwujud. Perilaku politik Generasi z, yang merupakan 27,94 persen dari populasi Indonesia, juga menarik perhatian (Sani, 2023). Gen z cenderung lebih aktif dalam menyuarakan tujuan politik mereka melalui media sosial, mereka memanfaatkan platform online untuk berbicara, membentuk gerakan, dan menyebarkan informasi.

Sebagai generasi yang sering dikaitkan dengan internet, Gen muda dapat berpartisipasi dalam bidang lain seperti pemilu, yang merupakan proses demokratis

di mana warga negara memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung. Tentu saja, terlepas dari berbagai macam peran yang dapat diambil oleh banyak orang, terutama Gen muda (Simamora et al., 2024). Generasi muda sangat penting untuk partisipasi pemilu dan proses demokratis karena mereka berfungsi sebagai bukan hanya pemilih tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan publik dan garis politik.

Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, memiliki akses yang luas terhadap informasi politik melalui media sosial. Dampaknya sangat signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, media sosial memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam percakapan politik dan gerakan sosial. Mereka dapat dengan cepat mengetahui berita terbaru, berpartisipasi dalam diskusi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu penting (Shandrina, 2024). Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa informasi yang mereka akses dan sebarkan adalah akurat dan kredibel, mengingat banyaknya hoaks dan berita palsu yang beredar di media sosial.

Keterlibatan generasi muda dalam pemilu memiliki potensi untuk menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa (Prayitno et al., 2023). Keterlibatan generasi muda dalam pemilu memiliki potensi yang sangat besar untuk menentukan arah demokrasi dan kemajuan bangsa. Generasi muda, yang terdiri dari milenial dan Gen Z, merupakan kelompok demografis yang semakin aktif dalam politik. Dengan jumlah pemilih yang signifikan, mereka dapat mempengaruhi agenda politik dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin. Partisipasi mereka dalam pemilu tidak hanya mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka, tetapi juga memberikan suara bagi isu-isu yang penting bagi masa depan, seperti perubahan iklim, pendidikan, dan keadilan sosial.

Dalam dunia politik sebenarnya, sikap politik generasi Z ini bias karena sebagian dari mereka masih dipengaruhi oleh orang lain, seperti orang tua dan media sosial. Meskipun Generasi Z memiliki banyak informasi dan mudah diakses, mereka masih membuat identitas dan nilai-nilai mereka. Mereka masih belajar dan memahami dunia politik yang rumit. Pengaruh orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting dalam hal ini. Dengan demikian, Gen z belum dapat dianggap sebagai kelompok pemilih yang rasional. Selain keterlibatan orang tua dalam pandangan politik generasi z, nyatanya konten di media, terutama media sosial menjadi preferensi politik utama bagi generasi z.

Dalam pemilukada yang diselenggarakan pada 27 November 2024 di Kota Sorong, Papua Barat Daya terjadi dengan penuh kontroversi. Berbagai permasalahan yang ada sebelum pemungutan suara, perdebatan antar para pendukung, permasalahan yang membawa beberapa kandidat bahkan hingga ke ranah hukum, nyatanya membuat partisipasi politik generasi z pada pemilukada menurun. Data dari Humas KPU Kota Sorong menunjukkan bahwa ada penurunan sebesar 30% jumlah pemilih pada pemilukda dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu (Humas KPU, 2024). Lebih lanjut, dari 30% penurunan tersebut, 20% diantaranya dari pemilih generasi z. Pemilih pemula yang merupakan generasi z banyak yang tidak datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. TPS ketika pilkada cenderung lebih sepi, tidak seperti ketika pemilu, warga harus mengantri di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada menurut dibandingkan pada saat pemilu pada 14 Februari 2024.

### **Literasi Digital adalah Gerbang Awal bagi Generasi Z Bermedia Sosial**

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Namun, konsep literasi telah berkembang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, literasi mencakup kemampuan dan pemahaman untuk mengolah, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan cara yang kritis dan kreatif (Lutfiatussabrina, 2024). Literasi adalah kemampuan untuk menemukan, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan tulisan dan cetak dalam kaitannya dengan berbagai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka serta untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas dan masyarakat mereka (Dewi et al., 2023). Dengan begitu, literasi sangat relevan untuk para generasi muda terutama generasi Z.

Generasi ini tumbuh di era digital di mana informasi tersedia secara melimpah dan cepat. Oleh karena itu, kemampuan literasi yang baik memungkinkan mereka untuk tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam komunitas dan masyarakat mereka. Dengan literasi yang kuat, Gen Z dapat menavigasi berbagai platform media, memahami isu-isu sosial, dan menyampaikan ide-ide mereka dengan efektif, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam dunia yang terus berkembang. Tidak hanya dampak positif yang didapatkan, generasi Z juga bisa memperoleh dampak negatif dari literasi tersebut apalagi pada digital.

Generasi Z ini sangat rentan untuk memperoleh informasi atau konten negatif, terutama dari media sosial, yang dapat memengaruhi perilaku mereka, orang tua, guru, dan pemerintah perlu memberikan perhatian dan bimbingan kepada mereka. Karena itu, literasi digital menjadi lebih penting sebagai salah satu program utama dalam pendidikan (Dewi et al., 2023). Literasi digital merupakan kunci untuk membantu Generasi Z memilah informasi, memahami konteks, dan mengembangkan kemampuan kritis. Dengan menjadikannya sebagai program utama dalam pendidikan, mereka akan dilengkapi keterampilan untuk menghadapi tantangan di era digital, berpartisipasi positif dalam masyarakat, dan membuat keputusan yang bijak. Ini juga mencakup penggunaan informasi secara konstruktif, bukan hanya menghindari konten negatif.

Di era digital, informasi politik beredar dengan sangat cepat dan mudah diakses melalui berbagai platform online. Literasi digital menjadi kunci bagi masyarakat untuk memahami dan menavigasi informasi politik yang kompleks, memilah fakta dari opini, serta mengenali propaganda atau berita bohong yang dapat memengaruhi pilihan politik mereka. Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, terlibat aktif dalam diskusi politik, dan memberikan suara berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, literasi digital dapat membantu masyarakat dalam memahami mekanisme politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta proses pengambilan keputusan politik.

Menurunnya minat membaca menjadi salah satu permasalahan utama dalam menurunnya tingkat literasi digital generasi z di Kota Sorong. Generasi z lebih nyaman untuk mendapatkan informasi apapun, salah satunya informasi tentang politik melalui media sosial. Padahal, media sosial yang dapat diakses oleh siapapun, yang dapat menuliskan ataupun memberikan informasi tentang apapun, baik yang tervalidasi maupun informasi hoax. Hal ini jika tidak memiliki literasi digital yang baik, akan membuat generasi z terpapar informasi yang tidak sesuai.

Selain itu, minat baca yang rendah, generasi z yang lebih suka membaca caption di media sosial, lebih suka membaca teks atau penjelasan yang singkat dan padat yang menjadi ciri khas dari media sosial. Hal inilah yang juga menjadi salah satu faktor pendukung menurunnya literasi digital generasi z di Kota Sorong. Generasi z yang tidak suka membaca panjang, sehingga informasi yang diperolehpun tidak secara keseluruhan, hanya potongan-potongan yang membuat pemahaman setiap orang juga berbeda, bahkan salah. Pemahaman yang salah dikarenakan tidak membaca informasi secara keseluruhan, hal ini sangat berdampak, karena salahnya informasi yang diterima, membuat kesalahan dalam memahami, ditambah jika generasi z membagikan kembali informasi "salah" tersebut. Hal ini tentu membuat informasi yang salah atau hoax ini menjadi semakin tersebar dengan target generasi muda.

Salah satu contoh penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian di salah satu grup facebook yang memiliki anggota grup terbanyak di Kota Sorong.



**Gambar 4**

### **Penyebaran Hoax terkait Perpanjangan Kepala Desa**

Sumber: Group Facebook Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), 2025

Pada gambar 4 adalah unggahan berita hoax pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan masa perpanjangan Kepala Desa adalah keliru. Informasi yang disajikan sepenuhnya salah dan tidak didukung oleh bukti. Metro News telah menelusuri dan menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerima tuntutan uji materi terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa (UU Desa) pada Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024 (Sumantri, 2025). Perpanjangan masa

jabatan kepala desa tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-XXII/2024 mengingat standar yang persis ditetapkan, maka Mahkamah Konstitusi hanya menolak gugatan uji materi dalam perkara ini karena telah kehilangan tujuan. Dari data metro news, dapat disimpulkan bahwa informasi yang di posting pada grup Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) adalah hoax karena tidak sesuai dengan kebenarannya.

Namun, bagi generasi z Kota Sorong, yang sebagaimana dijelaskan tidak suka membaca caption panjang di media sosial, melihat postingan hoax ini, langsung percaya dan dapat menyebarkannya kembali. Terlihat dalam postingan, banyak yang telah membagikan kembali postingan hoax tersebut. Tidak hanya berita hoax yang banyak dikonsumsi oleh generasi z di Kota Sorong, ujaran kebencian, caci maki dan saling menjatuhkan di media sosial, menjadi pemandangan sehari-hari yang dibaca dan dilihat oleh generasi z Kota Sorong. Pengaruh lingkungan sekitar, terutama dalam hal ini media sosial yang selalu diakses oleh generasi z, ikut berdampak pada pandangan politik generasi z di Kota Sorong.

### **Pentingnya Pelatihan Literasi Digital bagi Generasi Z dan sosialisasi dari Penyelenggara Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilu. Selain itu, juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu (Bawaslu, 2019). Salah satu tugas penting penyelenggara pemilu dan pemilu adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini termasuk melakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga pemantau pemilu agar proses pemantauan pemilu dapat dilakukan secara efektif dan transparan. Dengan demikian, penyelenggara pemilu dan pemilu berperan dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama penyelenggara pemilu dan pemilu adalah untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas. Ini berarti bahwa penyelenggara pemilu dan pemilu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses Pemilu agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan (Kuntag et al., 2023). Sebagai lembaga pengawas, Penyelenggara pemilu dan pemilu memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan setiap tahap pemilu, dari persiapan hingga penghitungan suara, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini mencakup memastikan bahwa pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa perantara, tersedia untuk semua warga negara tanpa diskriminasi, memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan pilihan setiap individu, serta memastikan kejujuran dan keadilan dalam seluruh proses.

Penyelenggara pemilu dan pemilu mengatur agar keamanan saat pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Hal ini penting agar tercipta Pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, Penyelenggara pemilu dan

pemilukada berperan sebagai penjaga integritas dan kredibilitas Pemilu. Mereka memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, menjalankan tugas dan haknya dengan jujur dan adil. Penyelenggara pemilu dan pemilukada juga berupaya untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas hasil Pemilu. Mereka memastikan bahwa hasil Pemilu mencerminkan suara rakyat secara akurat dan tidak terpengaruh oleh kecurangan atau manipulasi.

Keberagaman masyarakat dan latar belakang manusia sebagai individu menimbulkan berbagai variasi bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial. Salah satu bentuk variasi bahasa adalah pemakaian bahasa pada spanduk caleg (Wahdaniah et al., 2019). Keragaman masyarakat dan latar belakang setiap individu menyebabkan variasi dalam penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Contohnya, bahasa yang digunakan pada spanduk caleg merupakan salah satu bentuk variasi bahasa Spanduk caleg merupakan contoh menarik dari variasi bahasa. Caleg seringkali memakai bahasa yang khas daerah tertentu untuk menjangkau target pemilih mereka.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum (Wanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemilih adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk memilih calon-calon yang dianggap paling layak dalam suatu pemilu. Untuk dapat memilih, pemilih wajib terdaftar terlebih dahulu dalam pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Daftar pemilih ini penting untuk memastikan bahwa hanya orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan yang dapat memilih, serta untuk mempermudah proses pemilihan dan menghindari ancaman kecurangan.

Dalam prosesi ini, sayangnya, pemilih sering kali menjadi korban (Kamuli et al., 2023). Politik yang semakin terpolarisasi dan terpusat pada kepentingan sempit terkadang mengaburkan fokus pada kepentingan publik yang seharusnya lebih diutamakan. Politik yang semakin terpecah belah dan fokus pada kepentingan kelompok kecil, menghilangkan fokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Bayangkan, seharusnya politik bertujuan untuk memajukan masyarakat dan mencari solusi untuk masalah bersama. Namun, dalam kenyataannya, politik seringkali diwarnai oleh perdebatan yang tidak produktif dan pertentangan antara kelompok yang berbeda pandangan.

Generasi muda bisa dipercaya untuk memajukan bangsa Indonesia dengan keunggulan/eminensi yang mereka miliki; fisik mereka, semangat dan akal yang sehat untuk kemajuan Negara. Generasi muda bisa dipercaya untuk memajukan bangsa Indonesia dengan keunggulan/eminensi yang mereka miliki; fisik mereka, semangat dan akal yang sehat untuk kemajuan Negara (Al' Ayubi & Irawati, 2022). Teori generasi yang dikemukakan oleh Karl Mannheim tahun 1952 yang membahas tentang adanya perbedaan nilai antar generasi. Mannheim menjelaskan bahwa perbedaan nilai ini bukan hanya karena perbedaan usia, tetapi karena perbedaan pengalaman hidup yang membentuk cara pandang dan nilai-nilai mereka.

Generasi yang lebih muda, memiliki nilai-nilai yang lebih progresif dan terbuka terhadap perubahan, sementara generasi yang lebih tua mungkin memiliki nilai-nilai yang lebih tradisional dan konservatif. Perbedaan nilai ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antar generasi. Namun, Mannheim percaya pemahaman antar generasi sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Teori ini menjelaskan bahwa setiap generasi memiliki pengalaman hidup yang unik, yang dipengaruhi oleh peristiwa penting, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang terjadi pada masa mereka. Pengalaman ini membentuk nilai-nilai, pandangan dunia, dan cara berpikir mereka.

Generasi muda, yang hidup dalam perubahan yang penuh perubahan dan perkembangan pesat, memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda, dengan akses ke teknologi yang canggih, informasi yang melimpah, dan budaya yang lebih beragam. Pengalaman hidup yang unik ini membentuk nilai-nilai dan cara pandang mereka terhadap dunia, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan politik mereka. Jadi generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan bangsa. Mereka memiliki fisik yang kuat, semangat yang membara, dan akal yang sehat, yang semuanya merupakan aset penting untuk membangun negara yang lebih baik. Generasi muda diharapkan menjadi pemimpin masa depan, membawa perubahan positif dan mewariskan kemajuan bagi generasi berikutnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman politik bagi anak muda adalah melalui media sosial (Haloho, E. E., Rembang, M., & Waleleng, 2016). Media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau anak muda dan menyampaikan informasi politik dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Anak muda saat ini sangat aktif di media sosial dan menjadikan platform ini sebagai sumber informasi utama. Dengan memanfaatkan media sosial, informasi politik dapat disajikan dalam format yang lebih interaktif dan menarik, seperti video, infografis, dan konten multimedia lainnya. Hal ini dapat membantu anak muda untuk lebih mudah memahami konsep-konsep politik yang rumit dan meningkatkan minat mereka terhadap isu-isu politik.

Penyelenggara pemilu dan pilukada terus merangkul para generasi muda untuk meningkatkan kemampuan literasi digital yang dapat memisahkan berita akurat yang sesuai fakta dan mana yang berita hoaks (Tumpal, 2023). Upaya ini sangat penting agar kaum muda mampu membedakan berita akurat dari hoaks yang semakin marak beredar. Sosialisasi Penyelenggara pemilu dan pilukada berperan krusial dalam membekali generasi muda dengan kemampuan kritis dalam menyaring informasi di dunia digital. Dengan literasi digital yang mumpuni, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan, melawan penyebaran hoaks, dan berkontribusi pada Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Program-program edukasi Penyelenggara pemilu dan pilukada yang inovatif dan menarik menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan pemahaman pentingnya literasi digital bagi masa depan bangsa.



**Gambar 5**  
**Kegiatan Sosialisasi Pemilukada bagi Generasi Z**  
**di SMA Negeri 3 Kota Sorong**

Sumber: Dokumentasi Mafindo Kota Sorong, 2024

Penyelenggara pemilu dan pemilukada yang sering mengadakan sosialisasi dan berkolaborasi dengan Mafindo Kota Sorong adalah langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan bahwa Penyelenggara pemilu dan pemilukada sangat peduli dengan pentingnya literasi digital, terutama di kalangan generasi muda. Mafindo, sebagai organisasi yang fokus pada literasi digital, dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membedakan informasi yang benar dan hoaks. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Penyelenggara pemilu dan pemilukada berusaha untuk menjangkau masyarakat secara luas dan memastikan bahwa informasi tentang Pemilu disampaikan dengan benar dan mudah dipahami. Ini juga menunjukkan bahwa Penyelenggara pemilu dan pemilukada berusaha untuk membangun kepercayaan publik dan mendukung partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang demokratis dan berintegritas.



**Gambar 6**  
**Kegiatan Pelatihan Literasi Digital bagi Generasi Z**  
**di SMK Muhammadiyah, Aimas**

Sumber: Dokumentasi Mafindo Kota Sorong, 2024



**Gambar 7**  
**Kegiatan Pelatihan Literasi Digital bagi Generasi Z**  
**di IAIN Sorong**

Sumber: Dokumentasi Tim Tular Narar IAIN Sorong, 2024

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Mafindo Kota Sorong bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Kota Sorong melalui program Tular Nalar Sekolah Kebangsaan. Kegiatan ini bertema "Penginderaan Hoaks untuk Pemilu" dan berlangsung di SMK Muhammadiyah Aimas dan IAIN Sorong. Dalam acara tersebut, Mafindo memberikan materi sekaligus menyelenggarakan permainan interaktif yang bertujuan mencegah penyebaran hoaks terkait pemilu. Kegiatan ini melibatkan siswa kelas 3 SMA dan mahasiswa yang merupakan pemilih pemula generasi muda menjelang Pilkada.

Namun, sayangnya, kegiatan positif dan sangat berdampak ini hanya dilakukan di beberapa sekolah dan kampus saja (sampel), tidak dilakukan pada seluruh sekolah dan kampus yang ada di Kota Sorong atau tidak dilakukan secara massal yang dapat diikuti oleh seluruh siswa SMA/ mahasiswa se-Kota Sorong. Selain itu, kegiatan inipun dilakukan bukan inisiasi dari penyelenggara pemilu dan pemilukada sendiri, namun hanya sebagai mitra. Adapun yang menginisiasi adalah komunitas lainnya, seperti Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) Kota Sorong. Sementara kegiatan yang murni dilakukan oleh Penyelenggara pemilu dan pemilukada yang melakukan sosialisasi dengan target pemilih pemula belum ditemukan atau mungkin ada, namun tidak tersosialisasikan. Padahal, Penyelenggara pemilu dan pemilukada memiliki peran penting untuk meningkatkan literasi digital pemilih pemula, salah satunya siswa SMA dan mahasiswa.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika literasi digital bagi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Media sosial dapat menjadi media yang efektif dalam penyebaran informasi politik bagi generasi z. Meskipun demikian, dari 30 responden generasi z di Kota Sorong, 13 diantaranya atau 43% berada pada posisi dominan-hegemoni, yang percaya bahwa media sosial sebagai media penyampaian informasi politik dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi politik generasi z. Sementara itu, 10 generasi z lainnya atau sebanyak 33% berada pada kelompok negosiasi, yang menyatakan bahwa media sosial penting bagi generasi z dalam memperoleh informasi politik, namun harus dibarengi dengan tingkat literasi digital yang memadai, agar generasi z tidak tersulut dengan berita hoax maupun ujaran kebencian. Sementara itu, 7 generasi z atau sebesar 23% merupakan kelompok oposisi, yang menganggap media sosial menjadi ancaman bagi generasi z, terutama dimasa menjelang hingga akhir pemilukada, berbagai hoax, ujaran kebencian menjadi konten di media sosial, tidak hanya di dunia maya, generasi z kemudian terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis di dunia nyata.

Problematika literasi digital bagi pemilih pemula yang terjadi saat pilkada di Kota Sorong selain dipengaruhi oleh media sosial, kondisi lingkungan sekitar juga ikut berperan dalam pandangan politik generasi z. Literasi digital yang baik adalah kunci bagi generasi z dalam menghadapi masifnya informasi politik di media sosial. Selain itu, adanya sosialisasi dan pelatihan literasi digital oleh penyelenggara pemilu maupun organisasi lain, nyatanya dapat membuat para pemilih pemula lebih melek terhadap hoax dan ujaran kebencian menjelang pilkada. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat partisipasi politik generasi z yang merupakan pemilih pemula pada pilkada di Kota Sorong, Papua Barat Daya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sorong yang telah memfasilitasi dalam proses penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiarsi, D. (2019). Literasi Media Internet di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Humaniora*, 6(4).
- Al'Ayubi, S., & Irawati, T. N. (2022). Penguatan Literasi Digital melalui Peranan Media Sosial Bagi Generasi Muda. *Khaira Ummah*, 1(2).
- Baran, S. J. (2004). *Pengantar Komunikasi Masa: Literasi Budaya dan Media*. Salemba Humanika.
- Bawaslu. (2019). *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*.
- Dewi, N. N. A. S., Aristawati, N. P. W., Sriani, N. M., Astini, N. P. T., & Mitariani, N. W. E. (2023). Meningkatkan literasi digital bagi generasi z untuk mewujudkan generasi emas. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar*, 3.
- Dominika, & Susilo, D. (2024). Personal Branding Joko Widodo di Instagram Jelang Periode Akhir Kepresidenan. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 8(2), 176-196.

- Faradis, N., Ainya, N., Fauzah, A., Ichsan, M., & Anshori, A. (2023). Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024. *Prosiding Seminar Nasional*, 643-652.
- Haloho, E. E., Rembang, M., & Waleleng, G. (2016). Peran Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Manado 2016. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(4).
- Ida, R. (2022). *Metode Penelitian: Studi Media dan Kajian Budaya*. Kencana. <https://prenadamedia.com/product/metode-penelitian-studi-media-dan-kajian-budaya/>
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). DPT Pemilu 2024 Dalam dan Luar Negeri 204,8 Juta Pemilih. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- KPU, H. (2024). DPT Berdasarkan Usia. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *Lex Administratum*, 11(3).
- Lutfiatussabrina. (2024). Rendahnya Minat Literasi di Kalangan Generasi Z. <https://kumparan.com/lutfiatussabrina/rendahnya-minat-literasi-di-kalangan-generasi-z-23kLcuHuRFZ/1>
- Prayitno, R. B., Prayugo, A., Setianingsih, S., Kusuma, G. W., Khair, O. I., Firmansyah, J. P., & Pramono, W. (2023). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2024 Di Sman 1 Cisarua Desa Leuwimalang Kabupaten Bogor. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Sani, A. (2023). Persepsi Mahasiswa Tentang Kondisi Politik Indonesia Menjelang Pemilu 2024: Studi kualitatif terhadap mahasiswa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *KALODRAN (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 2(1).
- Sanjaya, Y. C. A. (2024). Mengenal Generasi Z dan Karakteristiknya. <https://lifestyle.kompas.com/read/2022/09/16/205141620/mengenal-generasi-z-dan-karakteristiknya?page=all>
- Shandrina, S. N. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Persepsi Politik Gen Z. <https://kumparan.com/salsabila-nur-shandrina/dampak-media-sosial-terhadap-persepsi-politik-gen-z-kritis-atau-mudah-terkecoh-23bGBca7oeV>
- Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Sorong, K. P. U. K. (2024). Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Sorong.

- Sumantri, A. (2025). MK Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Benarkah? Metro News.
- Tumpal, R. (2023). Bawaslu Harap Generasi Z Tingkatkan Literasi Digital Tangkal Hoax. <http://bawaslu.go.id/Id/Berita/Bawaslu-Harap-Generasi-Z-Tingkatkan-Literasi-Digital-Tangkal-Hoaks>
- Wahdaniah, W., Jamilah, J., Surbakti, E. B., & Isa, I. (2019). Pengaruh penggunaan bahasa dalam spanduk caleg terhadap minat pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kota Lhokseumawe. Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Wahid, A. (2017). Masyarakat serta Teks Media: Membangun Nalar Kritis Masyarakat pada Teks Media. UB Press.
- Wahyuni, H. I. (2013). Kebijakan New Media di Indonesia : Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan New Media di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Wahyuti, T. (2019). Urgensi literasi media digital bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2019. *Konvergensi*, 1(1).
- Wanti, I., Farlin, N., & Syahadat, M. I. (2023). Membangun Komunikasi Melalui Poadcast Sebagai Upaya KPU RI Meraih Engagement dengan Pemilih Generasi Muda. *Global Komunika*, 5(2).
- Wibawana, W. A. (2024). Jadwal dan Tahapan Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>